

BAGAIMANA ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER BERTAHAN? STUDI TENTANG ORGANISASI MSM DAN TRANSGENDER DI INDONESIA DAN TIMOR LESTE¹

Anna Marie Wattie² dan Sri Purwatiningsih³

²Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

³Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Anna Marie Wattie (e-mail: amwattie@yahoo.com)

Abstrak

Latar Belakang: *Men who have sex with men* (MSM) dan transgender (TG) merupakan sebagian dari berbagai kelompok yang berisiko terhadap infeksi HIV&AIDS. Secara global, terjadi eskalasi kasus HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG, tetapi datanya terbatas. *Community-Based Organization* (CBO) merupakan pionir dalam pemberian layanan HIV&AIDS untuk kelompok MSM dan TG. **Tujuan:** Studi ini bertujuan untuk melihat strategi organisasi yang bergerak dalam isu MSM dan transgender di Indonesia dan Timor Leste untuk bertahan. **Metode:** Studi dilakukan dengan menggabungkan studi kuantitatif dan kualitatif untuk menilai organisasi-organisasi MSM dan TG yang terkait dengan HIV&AIDS di Indonesia dan Timor Leste. **Hasil:** Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, ditemukan adanya variasi strategi yang dikembangkan oleh organisasi untuk dapat bertahan yang disesuaikan dengan kapasitas organisasi yang menangani MSM dan TG. Penilaian kapasitas organisasi dilihat berdasarkan indikator *governance* (tata kelola), efektivitas organisasi, keberlanjutan, dan atribut. **Kesimpulan:** Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara mencerminkan tingkat efektivitas *governance*, dan sustainability, serta praktik dan atribut dari setiap organisasi yang memengaruhi model strategi yang dikembangkan.

Kata kunci: MSM, Transgender, Organisasi, *best practices*, HIV&AIDS

¹ Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) yang didanai oleh ISEAN HIVOS tahun 2011. Sejalan dengan kerja sama antara ISEAN dan HIVOS dalam program berjudul *Strengthening Community System to Reduce Vulnerability to and Impact of HIV infection on MSM and TG in Insular South-East Asia*, payung penelitian ini bertujuan mengatasi kesenjangan kebutuhan terhadap pelayanan serta terbatasnya dukungan dan peningkatan kegiatan untuk mengurangi prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG.

HOW MSM AND TG ORGANIZATIONS CAN SURVIVE? STUDY ON ORGANIZATIONS WORKING ON HIV & AIDS IN INDONESIA AND TIMOR LESTE

Abstract

Background: Men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) are some of groups who have a high risk of infected by HIV&AIDS. Globally, there has been an increasing of HIV&AIDS cases among MSM and TG although the exact data regarding the incidence and prevalence are unavailable. Community-Based Organizations (CBO) are the pioneer in the delivery of services to MSM and TG who are infected with HIV&AIDS. **Objectives:** This study aims to see how the organization's strategy working on MSM and TG issues in Indonesia and Timor Leste to survive. **Methods:** This study uses a combination of qualitative and quantitative methods whereby qualitative analysis is used to augment quantitative data in order to assess the MSM and TG organizations working on HIV&AIDS. **Result:** Based on qualitative and quantitative data, the research found a variety of strategies developed by the organization to survive, where it adapts to the capacity of organizations related issues among the MSM and TG. The assessment on the CBO capacity and good practices was carried out on several indicators, including governance, organization effectiveness, sustainability and attribute. **Conclusions:** Social, cultural, economic, and political environments in each country determine the degree of organization effectiveness, governance, sustainability, practices and attributes of any organization that influences the developed strategy model.

Keywords: MSM, Transgender, Organization, best practices, HIV&AIDS

Pendahuluan

Perilaku seks sejenis ditemukan pada hampir semua kelas sosial, baik yang terbuka mengakuinya maupun yang masih secara tersembunyi. Perilaku ini meliputi laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki (MSM, *men who have sex with men*) dengan perilaku seksual yang berisiko terpapar HIV&AIDS. Transgender (TG atau lebih dikenal dengan istilah waria) juga termasuk dalam payung terminologi MSM, tetapi dengan pengertian yang lebih spesifik. Hal ini terkait dengan identitas gender kelompok transgender yang dianggap berbeda menurut norma sosial jika dikaitkan dengan jenis kelamin dan identitas gender mereka saat dilahirkan (Yuliani, 2006).

WHO (2010) melaporkan bahwa estimasi populasi MSM di Asia Tenggara adalah sekitar 6-12 persen dari populasi MSM di dunia. Epidemio HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG secara global meningkat, tetapi karena keterbatasan data dan sensitivitas isu, tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti jumlahnya. Hitungan secara kasar dengan *odds ratio* 1/5 menyebutkan bahwa 18,7 persen MSM dan TG di Asia terpapar HIV&AIDS. Sementara itu, mereka yang hidup dengan HIV di Indonesia untuk kelompok MSM mencapai 5,2 persen dan pada kelompok TG di Jakarta mencapai 34 persen. Kemudian di Timor Leste 0,9 persen kelompok MSM positif HIV, sedangkan data tidak ditemukan pada kelompok TG (WHO, 2010).

Studi mengenai MSM dan TG sebelumnya lebih memfokuskan pada MSM dan TG sebagai target penelitian, seperti mengkaji perilaku dan sikap waria terhadap HIV&AIDS atau konstruksi sosial yang mendiskriminasi mereka (Hartiti, dkk., 2009 dan Suwarti, 2009). Demikian juga dengan studi mengenai homoseksualitas sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada aspek perilaku dan identitas kelompok homoseksual (Rahardjo, 2009). Belum banyak studi yang mengkaji organisasi yang menangani TG dan MSM sebagai fokus penelitian. Beberapa studi terkait dengan kelompok LGBT menjelaskan bahwa kelompok ini banyak mengalami diskriminasi (USAID dan UNDP, 2014). Oleh karena itu, organisasi yang mewadahi mereka juga harus berstrategi untuk dapat bertahan di tengah diskriminasi dan marginalisasi yang dialami.

Organisasi berbasis masyarakat (CBO atau *community-based organization*) merupakan lembaga yang berada di garis depan dalam upaya menyediakan kebutuhan pelayanan HIV&AIDS bagi kelompok MSM dan TG. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil studi yang lebih menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi MSM dan TG terhadap upaya pengurangan dampak HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG di Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, hasil studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan sumbangan rekomendasi kebijakan terhadap upaya pengurangan prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG.

Metode Penelitian

Definisi Konsep

MSM merujuk pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, terlepas dari identitas dan orientasi seksual mereka, atau apakah mereka juga

berhubungan seksual dengan perempuan. MSM merujuk pada perilaku dan bukan pada identitas sosial di masyarakat. Termasuk dalam MSM adalah laki-laki yang aktif secara seksual dan teridentifikasi sebagai homoseksual (gay), biseksual, dan individu yang teridentifikasi di masyarakat sebagai laki-laki yang feminin. MSM juga mencakup laki-laki dengan karakteristik maskulin yang tidak dipersepsikan sebagai homoseksual maupun gay, tetapi melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki (*The Global Fund*, 2008).

Sementara itu, menurut *The Yogyakarta Principles*, transgender (TG) adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan individu dengan identitas atau ekspresi gender yang berbeda dari harapan konvensional yang mengacu pada jenis kelamin yang teridentifikasi secara fisik saat dilahirkan. Berikut adalah kelompok-kelompok yang termasuk sebagai TG. Pertama adalah perempuan yang mengidentifikasi dirinya menjadi laki-laki kemudian laki-laki yang mengidentifikasi dirinya menjadi perempuan, *cross-dresser*, dan berbagai identitas budaya ketika seseorang mengidentifikasi diri menjadi gender yang berbeda dari gender yang dilekatkan padanya berdasarkan jenis kelamin secara biologis saat ia dilahirkan (O'Flaherty dan Fisher, 2008).

Kerangka Analisis

Strategi bertahan (*survival strategy*) dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan eksistensi kediriannya yang bernilai atau dianggap bernilai, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dalam perspektif sosiologi, strategi bertahan lazimnya menjadi sebuah pilihan di tengah gerusan ancaman-ancaman yang setiap

waktu dapat merusak nilai-nilai yang menjadi kearifan dari sebuah komunitas (Sulaiman, 2014).

Sementara itu, suatu organisasi atau lembaga harus dapat beradaptasi secara cepat dan lebih baik agar dapat bertahan. Sebuah organisasi dapat menyikapi perubahan dan tuntutan perubahan zaman sehingga organisasi dapat dengan cepat membaca dan mengenali kondisi-kondisi baru dan segera beradaptasi terhadap perubahan itu (Goh, 1998).

Penilaian terhadap strategi bertahan yang diterapkan oleh organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi *excellence practices* berdasarkan kerangka kerja dari ICOM (Lighid dan Satia, 2009), terutama untuk menilai organisasi yang berupaya mencapai *excellence*. Selain efektivitas organisasi untuk memastikan bahwa dasar kebijakan institusi masih dipegang, peningkatan *excellence practices* juga perlu didukung dengan keberlanjutan dan *governance*. Keberlanjutan meliputi penilaian tentang sumber daya keuangan dan kelangsungan hidup organisasi, efektivitas program, dan

dampak jangka panjang. Sementara itu, *governance* meliputi peran yang sesuai untuk *board* atau manajerial organisasi dan sistem untuk menjamin kinerja, integritas, dan akuntabilitas (Lighid dan Satia, 2009).

Indikator-indikator penilaian untuk setiap poin adalah sebagai berikut.

a. *Governance*

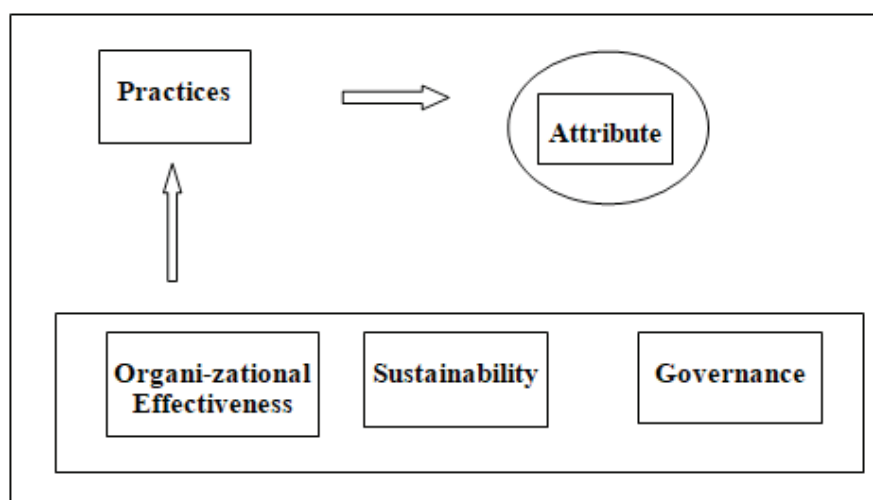
- pernyataan yang jelas mengenai struktur organisasi dan *job description*
- mekanisme yang efektif untuk integritas dan akuntabilitas

b. Keberlanjutan

- sumber pendanaan yang aman untuk menjamin keberlanjutan program
- program yang terus berjalan meskipun di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan
- jaringan yang luas dan *partnership*

c. Efektivitas organisasi

- latar belakang sejarah
- visi, misi, dan tujuan yang jelas
- penerimaan sosial, kelayakan finansial, dan perencanaan strategis
- kompetensi peran agar organisasi dapat melaksanakan strategi secara efektif



Sumber: Lighid dan Satia, 2009

Gambar 1 Kerangka Analisis/Penilaian Organisasi

d. Atribut

- keterlibatan yang berarti dan luas dengan MSM dan TG
- tanggapan pemerintah dan masyarakat terhadap organisasi dan kinerjanya.

Metode Pengumpulan Data

Studi ini dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkaya analisis dan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, observasi, FGD, dan revidi sejumlah dokumen. Sementara itu, secara kuantitatif, digunakan *check list* yang dikembangkan dari IOM dan PACT *Assessment Tools* (<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/164047/howdo/pactool.xls>). Hasil dari *check list* tersebut dianalisis dengan menghitung nilai dari setiap indikator untuk setiap organisasi. Hasil akhir untuk menilai *best practices* diperoleh berdasarkan data kualitatif yang ditriangulasi dengan penilaian secara kuantitatif.

Beberapa organisasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan merepresentasikan organisasi MSM dan TG dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keamanan dengan memperhatikan lama organisasi, kepengurusan, pendanaan, dan jaringan. Namun, pemilihan lembaga yang diteliti tidak dilakukan dengan sangat ketat dan memperhitungkan populasi. Di Indonesia, terpilih empat organisasi, yaitu Mediasi dan Hero yang berlokasi di Jakarta sebagai representasi lembaga yang mapan serta Seruling di Solo dan Setaman di Yogyakarta yang merepresentasikan lembaga dalam masa permulaan. Sementara itu, hanya ada satu organisasi terkait MSM yang peduli tentang HIV&AIDS untuk Timor Leste, yaitu Seruni yang berbasis di Dili. Untuk

kepentingan etika penelitian, nama-nama organisasi yang disebutkan tersebut bukan nama yang sebenarnya.

Wawancara dan FGD dilakukan terhadap staf manajerial dari setiap organisasi. Selain itu, wawancara dan FGD juga melibatkan beberapa penerima manfaat dari organisasi-organisasi tersebut. Kemudian untuk memperkaya data, juga dilakukan studi dokumen yang dimiliki oleh setiap organisasi, seperti akta pendirian, AD/ART, laporan tahunan, maupun dokumen lain yang menjabarkan visi misi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konteks Lokal MSM dan TG

a. Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perilaku homoseksual di masyarakat nusantara dapat digolongkan dalam lima tipologi berikut ini (Oetomo, 2001).

- hubungan homoseksual yang dikenal dan diakui, misalnya *induk jawi* di masyarakat Minang, *mairilan* yang mengacu pada hubungan antarsantri di pondok pesantren Jawa, atau *dalaq* di Madura
- hubungan homoseksual yang dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian atau mempertahankan kesakralan. Contoh dari tipologi ini adalah hubungan *warok* di Ponorogo yang agar tetap sakti hanya boleh berhubungan seksual dengan *gemblak* yang seorang remaja laki-laki.
- perilaku homoseksual yang dikaitkan dengan jabatan sakral pelakunya, misalnya penjaga pusaka kerajaan yang disebut dengan *bissu* di Sulawesi Selatan

- perilaku homoseksual yang dijadikan bagian ritual inisiasi, misalnya pada beberapa suku di Papua ditemukan hubungan *genitor-oral* dan *genitor-anal* antara remaja laki-laki dan laki-laki dewasa sebagai bagian ritual inisiasi dalam rangka mencapai maskulinitas
- perilaku homoseksual yang dilembagakan dalam seni pertunjukan, misalnya seni pertunjukan kadang melibatkan pemeran yang menjalankan peran homoseksual, seperti pada tari Seudati (Aceh), pertunjukan lenong Betawi, atau ludruk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada perbedaan cukup jelas antara transgender (yang biasa disebut waria) dan MSM. Waria adalah laki-laki yang berperilaku, berpenampilan (pakaian dan riasan), dan berganti nama dengan nama perempuan yang membuat mereka lebih terbuka tentang identitas seksual mereka. Sementara itu, MSM tetap dengan penampilan dan perilaku sebagai laki-laki, bahkan ada yang cenderung menonjolkan aspek maskulin secara fisik. MSM di Indonesia terdiri atas beberapa subkategori, seperti kaum gay serta laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan dan laki-laki lain (biseksual).

Kelompok MSM dan TG yang telah membuka identitasnya sering menerima pelanggaran-pelanggaran sebagai akibat dari pilihan mereka terhadap orientasi seksual yang dianggap berbeda. Kelompok LGBT sering menerima pelanggaran-pelanggaran terkait hak asasi manusia (HAM) karena orientasi seksual mereka yang dianggap berbeda (Ariyanto dan Triawan, 2008). Berbagai bentuk pelanggaran sering diterima oleh mereka, seperti stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Namun, negara seolah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut

meskipun Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kaum waria yang telah membuka identitasnya sering mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan sosial mereka, salah satunya adalah di lingkungan pendidikan. Perlakuan diskriminatif di sekolah berimbas terhadap tingkat pendidikan waria. Kebanyakan waria tidak mampu mencapai pendidikan tinggi karena mempertahankan penampilan dan identitas seksual mereka. Diskriminasi yang masih dialami oleh kelompok waria ini dipicu oleh adanya konstruksi sosial yang menganggap waria sebagai patologi sosial (Yuliani, 2006). Sebaliknya, kelompok MSM lebih diuntungkan dengan ketertutupan identitas dan upaya mempertahankan diri sebagai kelompok laki-laki. Dalam hal ini, kelompok gay dan biseksual masih tetap leluasa mengakses pendidikan formal dan pekerjaan, bahkan ada di antaranya yang melakukan pernikahan heteroseksual.

Berbagai stigma dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok MSM dan TG ini pada gilirannya menjadikan mereka kelompok yang tertutup. Padahal pada sisi yang lain, kelompok MSM dan waria di Indonesia juga merupakan salah satu kelompok yang berisiko terhadap HIV&AIDS. Ketertutupan mereka ini menjadikan kelompok MSM dan TG sulit dijangkau untuk pencegahan HIV&AIDS. Berdasarkan studi Surveilans Terpadu Biologis Perilaku pada Kelompok Berisiko (STBP) tahun 2007, diketahui terdapat 35.000 waria di Indonesia. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan waria pekerja seks mencapai 34 persen di Jakarta, 28 persen di Surabaya, dan 16 persen di Bandung, serta kurang dari 50 persen di antara mereka yang menggunakan kondom. Kemudian diketahui

Tabel 1 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS menurut Faktor Risiko, 2012 dan 2014

Faktor Risiko	2012	2014
Heteroseksual	18680	34305
Homo-Biseksual	1014	1366
IDU	10265	8462
Transfusi Darah	73	130
Transmisi Perinatal	912	1506
Tidak diketahui	1153	9536

Sumber: Statistik Kasus HIV&AIDS di Indonesia s.d. Juni 2012 dan s.d. September 2014, Ditjen PP & PL Kemenkes RI (<http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf>)

bahwa MSM berkontribusi 3,1 persen terhadap penyebaran HIV (http://www.msngf.org/index.cfm/id/17/country_id/88). Data dari Ditjen PP&PL Kemenkes RI pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sama dengan faktor risiko yang lain, faktor risiko homo-biseksual meningkat.

Sementara itu, jika mengaitkan kelompok LGBT dengan isu HIV&AIDS dianggap tidak seksi lagi. Besarnya perhatian terhadap kelompok LGBT memunculkan permintaan terhadap terpenuhinya hak asasi manusia. Namun, kegiatan-kegiatan mitigasi HIV&AIDS yang telah dilakukan terhadap kelompok ini telah menggembelng para LGBT untuk bertindak dan menuntut pengakhiran terhadap stigmatisasi dan diskriminasi pada mereka (Oey, 2012).

b. Timor Leste

WHO melaporkan terdapat sekitar 350 hingga 2.000 MSM/TG di Timor Leste. Sementara itu, hasil pemetaan di Dili pada 2008 menemukan 267 MSM yang telah terbuka dan masing-masing memiliki jaringan dengan MSM yang masih tertutup

sebagai pasangan sehingga diestimasikan terdapat sekitar 500 MSM di Dili (<http://aidsdatahub.org/en/timor-leste-reference-library/item/18306-timor-leste-msm-country-snapshots>). Informasi mengenai keberadaan MSM dan TG di Timor Leste diperoleh secara *snowball* berdasarkan informasi dari MSM yang telah secara terbuka mendeklarisasikan jati dirinya. Selain variasi antara MSM yang telah terbuka dan *hidden* MSM, juga terdapat keunikan dalam menyebut istilah TG. Berdasarkan wawancara dengan aktivis NGO, diketahui bahwa TG lebih digunakan untuk menyebut mereka yang telah memasang implan payudara meskipun kelompok ini sangat terbatas jumlahnya. Kemudian mereka yang tidak melakukan implan payudara lebih merasa nyaman dengan sebutan MSM. Dengan demikian, sangat jarang TG atau MSM yang berpenampilan seperti perempuan dijumpai di tempat umum karena masyarakat Timor menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Kalaupun ada TG yang berpenampilan layaknya perempuan, biasanya mereka ditemukan di acara-acara yang diadakan untuk kelompok MSM dan TG.

Tekanan Sosial terhadap MSM dan TG

a. Indonesia

Meskipun penerimaan terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia telah banyak didiskusikan sejak tahun 1990-an (Oetomo, 2001), keberadaan kelompok ini tetap mengundang kontroversi, apalagi kalau harus muncul di tempat-tempat umum. Kaum gay dan waria masih sering dianggap sebagai kelompok dengan “penyakit moral” atau komunitas yang “rusak” sehingga perlu “diperbaiki”. Berbagai tindak kekerasan terhadap kaum gay dan waria berpangkal dari pendapat bahwa satu-satunya seksualitas yang dapat diterima adalah heteroseksualitas atau hubungan antara mereka yang berbeda jenis kelamin (<http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/partners/236.html>).

Sementara itu, menurut Mulia (2008), stigma yang diberikan kepada kelompok homoseksual –gay atau lesbi- sering juga menggunakan dalih agama. Kelompok ini dipandang sebagai kelompok immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sebagai sekutu setan. Dalam komunitas muslim arus utama, penolakan terhadap homo dipandang mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Stigma dan diskriminasi yang sangat kuat terhadap gay, waria, dan ODHA merupakan penyebab utama kurangnya program yang responsif terhadap HIV&AIDS bagi kaum homoseksual di Indonesia (www.it'smylifecolub.co). Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab tidak berkembangnya organisasi yang menjangkau kaum gay dan waria jika dibandingkan dengan CBO yang bergerak isu-isu yang lain, misalnya isu gender dan kesehatan reproduksi.

Namun, tekanan dan kelonggaran yang diberikan kepada kelompok MSM dan TG di

Indonesia cukup bervariasi. Secara umum, penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kelompok waria lebih terbuka dibandingkan dengan kelompok gay. Hal ini juga yang menyebabkan lebih mudahnya dijumpai waria yang secara ekspresif menunjukkan identitas seksualnya dibandingkan dengan kaum gay yang cenderung lebih tertutup. Selain itu, kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan lokal di Indonesia yang beragam juga memberikan tekanan dan kelonggaran tersendiri bagi eksistensi kelompok waria dan gay, termasuk akses terhadap pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

b. Timor Leste

Meskipun diketahui bahwa keberadaan MSM di Timor Leste diakui oleh pemerintah - seperti dilaporkan oleh WHO (2010), di Timor Leste hubungan seks di antara laki-laki dewasa adalah legal - belum ada peraturan yang secara khusus melindungi MSM dan TG. Pada September 2009, Pemerintah Timor Leste menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang meningkatkan penerimaan pemerintah terhadap keberadaan kelompok MSM dan TG. Bentuk penerimaan terhadap MSM secara langsung dapat dilihat dari pelibatan kelompok MSM dalam acara-acara formal kenegaraan, seperti sebagai pembawa acara, pengisi acara hiburan, ataupun sebagai pembuat dekorasi acara. Sementara itu, pengakuan pemerintah terhadap organisasi yang memiliki program untuk MSM, seperti Seruni, dapat dilihat dari dukungannya terhadap program HIV&AIDS untuk kelompok MSM. Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang utama dalam pengorganisasian, implementasi, dan memonitor program HIV&AIDS di Timor Leste. Seruni menggunakan bendera HIV&AIDS

dalam bekerja sama dengan pemerintah karena sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberantas HIV&AIDS.

Meskipun tidak secara tegas menerima keberadaan MSM, gereja di Timor Leste juga tidak menolak eksistensi MSM. Untuk aktivitas gereja, dengan masyarakat di Timor Leste yang dikenal sebagai penganut Katolik konservatif, bahkan MSM telah dilibatkan dalam paduan suara gereja. Berdasarkan pengakuan informan MSM, dalam khotbah di gereja pun, pastor tidak pernah menyinggung atau menghakimi keberadaan MSM di Timor Leste.

Masyarakat juga cenderung permisif yang dibuktikan dalam acara seremonial, seperti pesta perkawinan, hampir semua kegiatan dipegang oleh MSM, seperti sebagai pembuat dekorasi acara, jasa katering, pemandu acara, dan pengisi acara hiburan. Alasannya sederhana: kelompok MSM dianggap sangat terampil menjalankan urusan-urusan terkait keindahan, kesenian, dan makanan.

Penerimaan pemerintah, gereja, dan masyarakat terhadap MSM di Timor Leste ini merupakan modal penting untuk mencegah HIV&AIDS pada salah satu kelompok yang berperilaku seksual berisiko ini. Koeswinarno (2005) menjelaskan bahwa waria diterima atau ditolak di dalam masyarakat akan sangat ditentukan dari cara mereka membangun negosiasi dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial tersebut. Keputusan masyarakat untuk menolak atau menerima kehadiran waria pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seorang waria, baik secara individual maupun kolektif, dalam merepresentasikan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini TG di Timor Leste mampu bernegosiasi dengan lingkungan sekitar sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat.

Meskipun keberadaan MSM di Timor Leste pada umumnya dapat diterima, mereka tidak dapat lepas dari stigma. Stigma yang menonjol adalah adanya terminologi yang berasal dari bahasa Tetum (bahasa di Timor Leste) yang merujuk pada MSM, yaitu *panlero* yang berarti laki-laki setengah perempuan. Jika ada orang yang memanggil mereka dengan sebutan *panlero*, mereka tidak dapat menerimanya atau marah karena bermakna negatif dan dianggap sebagai sebuah ejekan. Bentuk lain dari stigma terhadap MSM adalah adanya anggapan di masyarakat bahwa mereka tidak mau berdekatan dengan MSM karena takut tertular menjadi MSM. Stigma ini membuat banyak MSM belum mau terbuka terhadap identitasnya.

Strategi Bertahan Organisasi yang Bekerja untuk MSM dan TG

a. Indonesia

Ada beberapa variasi strategi yang diterapkan oleh organisasi MSM dan TG di Indonesia untuk dapat bertahan. Strategi ini merupakan upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan (Goh, 1998 dan Sulaiman, 2014) dan salah satu caranya adalah mengembangkan jaringan dengan organisasi sejenis. Hal yang sangat menonjol dalam konteks organisasi di Indonesia adalah kuatnya dukungan dari sebuah lembaga yang memayungi semua organisasi gay, waria, dan lesbian di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sebagai organisasi yang menginisiasi jejaring di antara organisasi yang bergerak dalam isu MSM dan TG di Indonesia.

Strategi bertahan dengan berjejaring, baik secara lokal, nasional, maupun internasional, juga sejalan dengan laporan UNDP dan USAID (2014). Dijelaskan bahwa sejumlah

organisasi secara sistematis berupaya membina komunitas dan jaringan di dalam kota atau kabupaten/provinsi yang sama, bahkan secara nasional. Organisasi gay telah memfasilitasi pembentukan organisasi gay lainnya dan kadang-kadang juga organisasi waria atau organisasi lesbian dan pria transgender.

Kuatnya jejaring yang dikembangkan ini menunjukkan hasil yang cukup positif. Sebagai contoh adalah Mediasi dan Hero yang mengakui bahwa jejaring yang dibangun di antara organisasi yang ada sangat membantu mereka bertukar pengalaman dan saling mendukung kegiatan masing-masing. Selain mendapatkan manfaat untuk saling mendukung dalam jejaring ini, Seruling dan Hero juga menjadi *implementing partner* bagi GWL-INA untuk menjalankan aktivitasnya di daerah mengingat GWL-INA berbasis di Jakarta dengan jangkauan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Seruling mengembangkan jejaring tersebut secara lebih luas dan hasilnya telah tampak saat ini ketika Seruling mampu memotivasi kelompok MSM dan/atau TG untuk berorganisasi di beberapa tempat.

Meskipun telah memiliki jejaring yang kuat, untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dan mendapatkan dana, mereka harus bersembunyi di balik organisasi yang berlabel "organisasi yang peduli dengan HIV&AIDS". Mereka tidak berani secara terbuka mengatasmakan diri sebagai organisasi khusus MSM dan TG karena masih kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap kedua kelompok ini.

(1) *Governance* (Tata Kelola)

Dua organisasi yang fokus pada isu TG, yaitu Hero dan Setaman, menunjukkan bahwa mereka harus berjuang keras

melawan stigma dari masyarakat sekitar. Hal ini mereka siasati dengan menunjukkan identitas mereka secara terbuka sebagai TG dan selalu memberi edukasi kepada masyarakat sekitar tentang hak-hak TG dan peran TG dalam pembangunan. Kedua organisasi ini menerapkan prinsip *good corporate governance* seperti yang dijelaskan oleh Syakhroza (2008), yaitu tata kelola organisasi yang baik menyangkut mekanisme mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi yang dilakukan oleh Setaman dan Hero adalah melibatkan TG dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara luas kepada masyarakat, seperti program *income generating*, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan kesenian yang tidak hanya untuk TG, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dengan fokus program yang melibatkan masyarakat sekitar tersebut, penerimaan masyarakat terhadap kaum TG menjadi semakin baik dan kapasitas TG dapat lebih berkembang. Hal ini juga dilakukan oleh Seruling. Dengan identitas diri yang sangat terbuka (sebagai gay), Ketua Seruling mampu memberi pemahaman kepada berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah daerah terhadap eksistensi atau keberadaan kaum gay di wilayah Solo dan sekitarnya.

(2) Efektivitas Organisasi

Mediasi, Seruling, maupun Setaman telah mampu menyusun berbagai dokumen yang diperlukan untuk menunjang eksistensinya sebagai sebuah organisasi. Hal ini tampak ketika organisasi memperoleh dana untuk membiayai suatu program atau kegiatan. Untuk memenuhi standar penyusunan dokumen, seperti rencana kegiatan tahunan maupun sistem pelaporan, termasuk laporan keuangan, berbagai upaya

dilakukan, misalnya mengikuti pelatihan khusus maupun belajar secara mandiri kepada para ahli atau pihak lain yang lebih menguasainya.

Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang para pengurus yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi dalam mengelola organisasi, padahal mereka tidak selalu memperoleh insentif atau gaji tetap. Kemauan yang besar untuk dapat mencapai tujuan organisasi ini sesuai dengan konsep efektivitas organisasi menurut Tangkilisan (2005), yaitu efektivitas organisasi menyangkut cara mewujudkan tujuan organisasi.

Adanya rencana kegiatan yang selalu disusun menunjukkan keseriusan organisasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi kelompok dampingannya. Hal ini pada gilirannya dapat memunculkan respons pemerintah yang ditunjukkan dengan berbagai aksi, seperti pemberian program pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis, termasuk obat-obatan dan pembagian kondom gratis. Dalam beberapa kesempatan, pengurus organisasi juga dilibatkan dalam pembahasan atau penyusunan rencana strategis dinas/instansi terkait di tingkat pemerintah lokal.

(3) Keberlanjutan

Mediasi, Hero, Seruling, dan Setaman menjaga eksistensi organisasi demi keberlanjutan program dengan terus memelihara jejaring dengan GWL-INA. Relasi dengan pihak pemerintah dan lembaga donor asing juga terus dimantapkan untuk mengakses dana. Selain itu, penggalangan dana juga dilakukan secara internal melalui iuran sukarela atau dengan cara menyisihkan 10 persen dari uang gaji dan honor yang mereka terima ketika mengikuti pelatihan atau seminar untuk lembaga/organisasi.

(4) Atribut

Kualitas pencapaian mencerminkan seberapa jauh struktur organisasi, program, kegiatan, dan jejaring yang dimiliki oleh suatu organisasi berdampak secara internal maupun eksternal. Setaman berhasil membangun jejaringan dengan berbagai pihak, seperti organisasi lain, pihak akademisi, pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, keberadaan Setaman sangat dikenal dan tidak lagi dianggap sebagai organisasi yang harus di jauhi atau diperlakukan secara diskriminatif. Banyak mahasiswa yang menyusun skripsi atau tesis dengan mengangkat masalah TG mengambil Setaman sebagai studi kasus dan narasumber. Hal ini karena mereka melihat keberhasilan program dan manajemen organisasinya. Setaman juga berhasil meyakinkan pemerintah bahwa kelompok TG patut mendapat perhatian yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga program pemberdayaan khusus untuk kelompok TG juga mendapat porsi anggaran tertentu di pemerintah daerah. Selain itu, Setaman dikenal oleh kelompok TG di seluruh wilayah Jawa dan luar Jawa sebagai organisasi atau lembaga yang mempunyai kepedulian paling tinggi dalam penanganan HIV&AIDS. Hal ini terkait dengan akses Setaman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pihak Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Timor Leste

Jika organisasi-organisasi di Indonesia mengembangkan strategi bertahan dengan menguatkan jejaring, organisasi di Timor Leste melakukan hal yang berbeda karena belum banyak organisasi sejenis di wilayah tersebut. Organisasi di Timor

Leste menggunakan pendekatan dukungan pemerintah dan lembaga donor sebagai strategi untuk bertahan. Namun, organisasi ini juga masih harus berlindung di bawah 'bendera' HIV&AIDS untuk mendapatkan dana dari lembaga donor dan dapat bekerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, penerimaan masyarakat terhadap kelompok MSM dan TG juga lebih terbuka dibandingkan dengan di Indonesia sehingga organisasi di Timor Leste juga dapat lebih terbuka.

(1) *Governance* (Tata Kelola)

Sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak dalam isu HIV&AIDS dengan sasaran utama kelompok MSM dan TG, Seruni mampu bekerja sama dengan sangat baik dengan pemerintah nasional dan kota. Legalitas keberadaan MSM di Timor Leste, seperti yang dilaporkan WHO dalam TREAT (2006), tampak dari pengakuan pemerintah pada organisasi ini sebagai bagian dari sasaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara empiris, ada pelibatan MSM dan TG dalam kegiatan formal, bahkan acara kenegaraan merupakan salah satu modal penting yang dimiliki oleh MSM dan TG di Timor Leste. Polisi dan pihak militer merupakan unit pengamanan yang juga dilibatkan sebagai sasaran dalam program sehingga secara umum kegiatan-kegiatan Seruni memperoleh jaminan keamanan.

Secara internal, organisasi ini juga telah memenuhi aspek-aspek organisasi yang penting dengan adanya struktur pengurus, sistem keuangan teraudit, jaminan sosial bagi pengurus dan aktivis, serta jaringan yang baik dengan mitra dan benefisiaris. Struktur organisasi Seruni terdiri atas struktur keanggotaan dan jajaran eksekutif. Kejelasan struktur ini kemudian diterjemahkan menjadi

pembagian kerja untuk setiap komponen. Seruni juga memiliki sistem *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja staf dan capaian program yang dijalankan dengan baik karena program evaluasi dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Sementara itu, urusan keuangan juga telah dikelola dengan sistem akuntansi dan pengelolaan yang terstruktur, serta ada audit yang rutin. Audit keuangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara kuartalan dan tahunan karena selama ini Kementerian Kesehatan menjadi PR (*Principle Recipient*) dari *Global Fund*, sedangkan Seruni merupakan SR (*sub-recipient*).

(2) Efektivitas Organisasi

Seruni telah berhasil menunjukkan bahwa program yang baik dan tepat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki tiap komunitas sasaran. Sebagai contoh *best practices* adalah sosialisasi tentang HIV&AIDS yang dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi tempat indekos atau tempat kerja para MSM dan TG. Selain itu, Seruni selalu mengadakan kegiatan yang bersifat menyenangkan untuk menjangkau MSM dan TG, misalnya melalui kegiatan lomba dansa dan peragaan busana yang dilakukan hingga ke desa-desa. Hal ini menjadi nilai tambah Seruni dalam menjangkau target karena masih banyak MSM dan TG tertutup.

Secara praktis, Seruni terus berupaya untuk menggunakan beberapa pendekatan demi mengamankan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari target layanan di tengah lingkungan sosial yang kurang mendukung. Cara yang digunakan adalah menggabungkan layanan-layanan langsung, seperti tindakan preventif, VCT, dan pendampingan, dengan kebijakan

advokasi, aktivitas penyadaran publik, dan upaya sensitivitas. Upaya yang dilakukan oleh Seruni ini seperti yang dijelaskan oleh Tangkilisan (2005) dan Sedarmayanti (2009) mengenai efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan.

Kegiatan praktis yang cukup efektif karena mampu menjangkau sasaran di tempat yang tepat adalah dengan menyediakan seks aman untuk MSM dan TG melalui program *Dispenser Condom*. Layanan yang diletakkan di semua hotel di Dili serta di semua tempat indkos MSM dan TG diharapkan dapat menjadi media preventif terhadap HIV&AIDS. Kelebihan program ini adalah adanya dukungan pemerintah dan aparat keamanan, suatu hal yang sangat jarang terjadi di negara/daerah lain. Aparat, bahkan mempunyai kewenangan untuk menegur pengelola hotel yang tidak menyediakan layanan kondom gratis ini.

(3) Keberlanjutan

Di Timor Leste, institusi yang peduli dengan isu HIV&AIDS tidak memiliki hambatan berhubungan dengan lembaga donor. Berdasarkan penjelasan dari Program Manager Seruni, sebenarnya banyak lembaga donor yang menawarkan dana di Timor Leste, tetapi kapasitas staf di Seruni agak terbatas. Hal ini menyebabkan Seruni tidak berkesempatan untuk bekerja sama dengan lebih dari satu lembaga donor. Sejak 2009 hingga 2015, Seruni didukung oleh Global Fund yang merupakan *sub-recipient* untuk memerangi AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GFATM) untuk Round 10 sejak 2012. GFATM menyediakan dana untuk Seruni dalam program perubahan perilaku terkait isu HIV melalui Kementerian Kesehatan yang

merupakan *principal recipient* dari GFATM.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Seruni memiliki relawan di setiap desa. Relawan didukung oleh staf lapangan untuk menjangkau MSM di desa yang tampaknya masih resisten terhadap jati dirinya dan terhadap MSM dan TG sendiri. Seperti telah dijelaskan, masyarakat di desa-desa pada umumnya masih resisten terhadap MSM dan TG karena mereka memiliki ketidakpahaman serta stigma terhadap MSM dan TG. Meskipun ketidakpahaman berdampak pada diskriminasi dan kekerasan terhadap MSM dan TG di masyarakat, sejauh ini staf lapangan dan relawan Seruni masih dapat melakukan kegiatannya dengan cukup teratur.

(4) Atribut

Mengacu teori Lighid dan Satia (2009), atribut dinilai berdasarkan unsur keterlibatan anggota dan tanggapan pemerintah terhadap keberadaan organisasi. Dalam konteks lokal Kota Dili dan nasional negara Timor Leste, Seruni merupakan satu-satunya organisasi yang berpartner dengan pemerintah untuk menanggulangi HIV&AIDS di negara tersebut. Pencapaian kualitas organisasi, baik secara kelompok maupun individu, juga tercermin dari posisi dan peran penting aktivis organisasi ini dalam badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu National AIDS Commission (NAC). Sebagai organisasi yang tergolong masih baru dan berasal dari negara yang baru pula, Seruni aktif mengirim perwakilan untuk mengikuti kegiatan berskala internasional, seperti seminar dan *workshop*. Dengan demikian, nama Seruni menjadi lebih dikenal di kancah internasional sebagai salah satu upaya membangun jaringan internasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Secara umum, penerimaan sosial terhadap individu atau organisasi MSM dan TG cukup baik meskipun mereka belum secara terbuka menyatakan diri sebagai organisasi yang mewadahi MSM dan TG. Pada umumnya organisasi-organisasi ini lebih memilih berlindung di bawah label HIV&AIDS agar mereka lebih leluasa bergerak dan mengimplementasikan program pengurangan dampak HIV&AIDS kepada kelompok MSM dan TG. Hal ini karena penerimaan yang relatif terbuka dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kelompok ini ternyata masih dibayangi oleh stigma terhadap MSM dan TG. Organisasi masih menghadapi kondisi yang tidak aman ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan penegakan moral.

Sementara itu, secara legal, Timor Leste mengakui hubungan seks sesama laki-laki, sebuah kondisi yang memberikan kenyamanan untuk MSM/TG. Di Indonesia, meskipun ada kelompok garis keras yang menolak, masyarakat masih memberikan atmosfer yang relatif nyaman untuk MSM dan TG. Keberadaan TG lebih diterima dibandingkan dengan gay dan situasi ini memengaruhi perbedaan individu maupun kelompok MSM dan TG dalam hal keberanian untuk muncul di publik.

Tata kelola atau *governance* mencakup peran yang memadai bagi sumber daya dan sistem untuk mendukung kinerja, integritas, dan akuntabilitas organisasi. Dengan membandingkan aspek *governance* organisasi MSM dan TG yang ada di Indonesia dan Timor Leste, indikator tata kelola menunjukkan bahwa struktur organisasi berhasil dibangun untuk menjaga pembagian

tugas dan mekanisme kontrol. Namun, dalam praktik organisasi tampak adanya permasalahan dengan aspek kepemimpinan dan pembagian kekuasaan yang menjadi tantangan bagi organisasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di Timor Leste yang menunjukkan bahwa satu-satunya organisasi MSM dan TG yang ada telah terorganisasi dengan baik.

Baik di Indonesia maupun Timor Leste, sebenarnya suatu organisasi dimungkinkan untuk menyatakan diri secara jelas sebagai organisasi MSM atau TG. Kejelasan identitas suatu organisasi sangat bermanfaat dalam upaya menjalankan program dan kegiatan karena dukungan – dan penolakan - terhadap program dan kegiatan tersebut akan menjadi jelas juga. Hal ini telah dialami oleh MSM dan TG di Indonesia, tetapi satu-satunya organisasi yang bekerja untuk MSM dan TG di Timor Leste, yaitu Seruni, masih berlabel organisasi HIV&AIDS.

Aksesibilitas terhadap lembaga donor di Indonesia cukup baik karena organisasi diperbolehkan mengajukan dan mengatur sendiri dana yang diperoleh dari lembaga donor. Sementara itu, di Timor Leste, organisasi tidak dapat leluasa mengakses dana karena status Seruni adalah sebagai *sub-recipient* di bawah Kementerian Kesehatan yang menjadi *principal recipient*. Organisasi di Indonesia memiliki aksesibilitas langsung terhadap lembaga donor, tetapi tidak otomatis memudahkan organisasi mendapatkan kucuran dana. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya organisasi yang membutuhkan dana, sedangkan lembaga-lembaga donor yang ada tidak mampu memenuhi semua permintaan sehingga terjadi kompetisi yang tinggi di antara organisasi MSM dan TG maupun organisasi lain.

Adanya GWL-INA yang merupakan konsorsium untuk MSM dan TG di Indonesia

merupakan upaya strategis dalam hal jejaring, keuangan, dan pengakuan sosial. Hambatan mendasar dalam aspek keberlanjutan organisasi MSM dan TG di Indonesia adalah kapasitas staf yang rendah dan penerima manfaat yang juga terbatas kapasitasnya untuk menciptakan program yang dapat meningkatkan keuangan organisasi dan sekaligus meningkatkan kapasitas dan potensi sumber daya manusia.

Rekomendasi

Adanya stigma dan diskriminasi terhadap kelompok MSM dan TG berdampak pada terbatasnya ruang gerak organisasi. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara kebutuhan terhadap pelayanan serta terbatasnya dukungan dan peningkatan kegiatan untuk mengurangi prevalensi HIV&AIDS di kalangan MSM dan TG. Secara umum, rekomendasi untuk pemerintah terbagi dalam dua hal berikut.

Pertama, meningkatkan dukungan politik dan finansial kepada MSM dan TG, baik secara individu maupun organisasi. Kedua, memberikan perlindungan kepada individu dan organisasi MSM dan TG dengan kerangka hak asasi manusia.

Secara khusus, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan komitmen untuk memenuhi hak sipil bagi MSM dan TG dengan desain skema bantuan dan alokasi anggaran untuk memberdayakan organisasi MSM dan TG. Yang lebih penting adalah melindungi individu dan kelompok ini dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Hal ini juga berlaku untuk MSM dan TG di Timor Leste. Meskipun MSM dan TG di Kota Dili dapat menikmati kondisi yang relatif lebih baik, mereka yang tinggal di perdesaan

masih membutuhkan pengakuan dan jangkauan pelayanan. Perlindungan dan jaminan keamanan dari tindakan diskriminatif terhadap individu dan organisasi MSM dan TG diharapkan dapat memberi keleluasaan untuk pengembangan potensi dan kapasitas yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya prevalensi HIV&AIDS di kalangan kelompok MSM dan TG maupun masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Ariyanto dan Triawan, Rido. 2008. *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Yogyakarta: Arus Pelangi dan Yayasan Tifa.
- Capriati, Wigke dan Permana, Yogi Setya. 2008. "Gerak Progresif Gerakan Gay Kontemporer di Yogyakarta" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12 (1), 59-77, Juli.
- Colonne, Stevanus dan Eliana, Rika. 2005. "Gambaran Tipe-tipe Konflik Interpersonal Waria Ditinjau dari Perspektif Gender" dalam *Psikologia*, VI (2), 96-104, Desember.
- Fahamu. 2004. "Community Based Organisations: The Emerging Force within the Third Center". Fahamu Oxford and Durban, and Center for Adult Education South Africa". Diunduh dari <http://www.fahamu.org/downloads/CBOSurveyReport.pdf>.
- Goh, Swee C. 1998. "Toward a Learning Organization: The Strategic Building Blocks". *Sam Advanced Management Journal*. Faculty of Administration, University of Ottawa.
- Hartiti, Tri, Riwayati, dan Arif Sofyan. 2010 "Manajemen Kasus HIV AIDS terhadap Kualitas Hidup ODHA Waria di LSM Graha Mitra Semarang" dalam *Jurnal Fikkas Unimus*, 03 (01), 45-54, Maret.

- HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific. 2011. "Asia-Pacific Country Reviews August 2011: Timor Leste at A Glance". Source: <http://aidsdatahub.org/en/timor-leste-reference-library/item/18306-timor-leste-msm-country-snapshots>.
- Koeswinarno. 2005. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lighid, Elmer Herradura dan Satia, Jay. 2009. *Achieving Excellence in Your NGO: Concept, Framework, Assessment Instruments, and Intervention Tools*. International Council on Management of Population Programmes.
- Mulia, Musdah. 2008. "Adakah Islam Bicara Soal Homo?" dalam *Madina*, 6 (1), 90-92. Juni 2008.
- Oetomo, Dede. 2001. *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.
- OECD. 2006. "DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation, OECD, Paris". Diunduh dari <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7231>.
- Oey, King. 2012. "When Talking of TGBT, Whose Moral Authority Counts?" Paper dipresentasikan pada the Second International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia (SEAHRN); 17-18 Oktober 2012, Jakarta.
- O'Flaherty, Michael and Fisher, John. 2008. "Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualizing the Yogyakarta Principles" dalam *Human Rights Law Review*. Published by Oxford University Press.
- Philippine National AIDS Council. 2012. "Global AIDS Response Progress Report" diunduh dari <http://aidsdatahub.org/en/reference-librarycols2/item/24189-ungass-country-progress-report-philippines-philippine-national-aids-council-2012>.
- Putri, Madha Tresnowaty dan Sutarmanto, Hadi. 2009. "Kesejahteraan Subjektif Waria Pekerja Seks Komersial (PSK)" dalam *Psikohumanika*, II (2), 46-55, Februari.
- Rahardjo, Wahyu. 2009. "Homophobia dan Kita" dalam *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1), 11-23, Juni.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syakhroza, Ahmad. 2008. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Sulaiman, Aimie. 2014. "Strategi Bertahan (Survival Strategy); Studi Tentang "Agama Adat" Orang Lom" dalam *Jurnal Society*, II (1), 1-14.
- Suwarti. 2009. "Strategi Coping Waria dalam Menghadapi Kecemasan Terjangkit HIV&AIDS di Purwokerto" dalam *PSYCHO IDEA*, 7 (1), 35-47, Juli.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Teh, Kooch Y. 2008. "HIV-related needs for safety among male-to-female transsexuals (mak nyah) in Malaysia" dalam SAHARA J. 2008 Dec; 5(4):178-85. Diunduh dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19194599>.
- The Global Fund. 2008. *The Global Fund Gender Equality Strategy*. Geneva: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
- TREAT ASIA. 2006. "MSM and HIV&AIDS risk in Asia: what is fueling the epidemic among MSM and how can it be stopped?" *Amfar Special Report*. Bangkok.
- UNAIDS. 2006. "Consultative Meeting MSM and HIV&AIDS in the Philippines". Diunduh dari <http://lagablab.files.wordpress>.

com/2006/08/msm-consultation-overview-unaid-philippines-aug-2006.pdf.

- UNAIDS. 2009. "Philippines Country Report". Diunduh dari http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knownyourresponse/countryprogressreports/2010countries/philippines_2010_country_progress_report_en.pdf.
- UNDP dan USAID, 2014. *Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia*. Jakarta.
- UNECA. 2007. *National Information and Communication Infrastructure (NIC) e-Strategies: Best Practices and Lesson Learnt*. United Nation Economic Commission for Africa.
- UNGASS. 2012. *UNGASS Country Progress Report: Philippines*.
- WHO. 2010. *HIV&AIDS among Men who have Sex with Men and Transgender Population in Southeast Asia: the Current Situation and National Responses, WHO Regional Office for Southeast Asia*.
- Yuliani, Sri. 2006. "Menguak Konstruksi Sosial di Balik Diskriminasi terhadap Waria" dalam *Jurnal Sosiologi Dilema*, 18 (2), 129-140.